



Menguatnya Perkembangan Salafisme dan Dominasi Ekonomi Kelompok Bisnis Arab di Banyumas

Fajar Assidiq✉

Universitas Diponegoro

Informasi Artikel

History of Article

Received March 2019

Accepted May 2019

Published July 2019

Keywords:

Electoral Politics, Salafism,
Arab Business Group,
Banyumas

Abstract

The development of electoral politics in Banyumas which led to the increasingly strong economic and political domination of Arab business groups influenced the development of Salafism especially in urban areas. This is due to the construction of sites spreading Salafism, such as foundations. Islamic boarding schools, mosques, schools and hospitals come from donations that they provide from the benefits of doing business in the fields of property construction, furniture, education and health. Banyumas as a "bull pen" gives an illustration that the majority of the population is not too attached to religious primordial ties (abangan). This background fosters the development of kejawen Islam and Christianization. The flourishing of kejawen Islam and Christianization responds to the increasingly rapid spread of Salafism. That is because the main purpose of Salafism is the purification of Islam from heresy, shirk, and khurafat which are closely related to Islam and Christianity. In addition, Banyumas as a "bull pen" shows the strong dominance of the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P). This region even had a significant impact in winning in Central Java. Therefore, this region has always been the target of winning. However, as Salafism strengthens, the effort to win this time has been challenged by a challenger. Salafism which is included in the line of challengers is trying hard to "whiten" this region. So the use of religious issues in mass mobilization efforts is inevitable. By looking at some of these cases the dynamics of the Banyumas community which has been known as Brayan Urip (living in harmony) in a way of socializing saving time bombs that can lead to conflict due to a struggle for stronger identity and unequal control of economic resources in the implementation of electoral politics in Banyumas.

Abstrak

Perkembangan politik elektoral di Banyumas yang mengarah kepada semakin kuatnya dominasi ekonomi-politik kelompok bisnis Arab berpengaruh terhadap perkembangan Salafisme terutama di perkotaan. Hal tersebut karena pembangunan situs-situs penyebaran Salafisme, seperti yayasan, pesantren, masjid, musala, sekolah dan rumah sakit berasal dari donasi yang mereka berikan dari keuntungan menjalankan bisnis di bidang konstruksi properti, furnitur, pendidikan dan kesehatan. Banyumas sebagai "kandang banteng" memberikan ilustrasi bahwa mayoritas penduduknya tidak terlalu terikat dengan ikatan primordial keagamaan (*abangan*). Latar belakang tersebut menyuburkan perkembangan Islam *kejawen* dan kristenisasi. Tumbuh suburnya Islam *kejawen* dan kristenisasi merespon penyebaran Salafisme yang semakin pesat. Hal tersebut karena tujuan utama Salafisme adalah pemurnian Islam dari *bid'ah*, *syirik*, dan *khurafat* yang erat kaitannya dengan Islam *kejawen* dan kristenisasi. Selain itu, Banyumas sebagai "kandang banteng" menunjukkan kuatnya dominasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Wilayah ini bahkan memberikan dampak signifikan dalam meraih kemenangan di Jawa Tengah. Oleh karena itu, wilayah ini selalu menjadi target pemenangan. Namun, demikian seiring menguatnya Salafisme, usaha meraih kemenangan tersebut kali ini mendapatkan tantangan cukup kuat dari penantang. Salafisme yang termasuk dalam barisan penantang berusaha sekuat tenaga "memutihkannya" wilayah ini. Sehingga penggunaan isu agama dalam upaya mobilisasi masa tidak dapat terelakkan. Dengan melihat beberapa kasus tersebut dinamika masyarakat Banyumas yang selama ini dikenal *brayan urip* (hidup rukun) dalam cara bergaul menyimpan bom waktu yang dapat menimbulkan konflik karena pergulatan identitas yang semakin menguat dan penguasaan terhadap sumberdaya ekonomi yang tidak merata dalam penyelenggaraan politik elektoral di Banyumas.

PENDAHULUAN

Pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, Jawa Tengah (Jateng) menjadi wilayah kunci penentu kemenangan, terutama untuk pasangan Jokowi-Ma'ruf yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Hal ini karena wilayah ini merupakan basis masa *abangan* ("kandang banteng)." Hal tersebut tidak dapat dilepaskan dari realitas bahwa Jateng merupakan basis PDI-P. Berdasarkan survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia Denny JA (LSI Denny JA) 2018, PDI-P menguasai 46 persen suara di Jateng. Sedangkan pesaing terdekatnya Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), yang merupakan parpol pendukung utama Prabowo-Sandi hanya menguasai 6,2 persen suara. Kuatnya dominasi PDI-P di Jateng juga dapat dilihat dari hasil Pemilihan Gubernur 2018 (Pilgub 2018) yang memenangkan pasangan Ganjar Pranowo dan Taj Yasin dengan perolehan suara 58,78 persen. Sedangkan penantangannya, Sudirman Said dan Ida Fauziyah yang didukung Gerindra mendapatkan 41, 22 persen.

Pada Pilpres 2019, jumlah daftar pemilih tetap (DPT) di Jateng 27.961.686. Sedangkan DPT nasional sebesar 192.828.520 yang terdiri dari 190.770.329 pemilih dalam negeri dan 2.058.191 pemilih luar negeri. Berdasarkan data tersebut, maka perolehan suara di Jateng menyumbang 14,5 persen perolehan suara nasional. Pasangan Jokowi-Ma'ruf menargetkan menang 75 persen di wilayah ini.

Banyumas merupakan wilayah yang paling signifikan menyumbang kemenangan di Jateng. Wilayah ini merupakan "kandang banteng." Kuatnya dominasi PDI-P di wilayah ini dapat dilihat dari perolehan suara pada Pemilu 2014, yang mencapai 288.354 suara. Perolehan suara ini mengantarkan PDI-P meraih 16 kursi dari 50 kursi yang diperebutkan di parlemen Banyumas. Jumlahnya hampir tiga kali lipat dengan lawan politiknya, Gerindra yang hanya memperoleh 6 kursi parlemen. Perolehan suara di wilayah ini dalam penyelenggaraan pemilu di Jateng sangat berpengaruh terhadap perolehan suara di wilayah se-Karesidenan

Banyumas, yaitu Purbalingga, Cilacap dan Banjarnegara. Jumlah DPT di daerah ini sebanyak 3.543.993 orang, yang terdiri dari Banyumas berjumlah 1.332.434 orang, Cilacap 1.442.974 orang dan Banjarnegara 768.585 orang. Perolehan suara di wilayah ini berarti menyumbang perolehan suara di tingkat Jateng sebesar 12,6 persen.

Usaha memenangkan Banyumas, pada Pemilu 2019 mendapatkan tantangan yang berat dari penantang yang juga berupaya meruntuhkan dominasi PDI-P dan menjadikan wilayah Banyumas menjadi wilayah "putih." Islam sebagai kekuatan politik arus utama Pemilu 2019, menjadi modal utama dalam usaha mobilisasi masa. Maka demikian, kuatnya perkembangan Salafisme di Banyumas menjadi modal penting bagi pasangan Prabowo-Sandi untuk memutihkan wilayah ini. Secara garis besar, Salafisme di Banyumas terkumpul di tim pemenangan Koppasandi (Komando Ulama untuk Pemenangan Prabowo-Sandi), yang diketuai oleh Ketua FPI Banyumas, Kyai Slamet. Koppasandi merupakan tim pemenangan khusus Prabowo-Sandi, yang hanya ada di Jateng dan Jatim (Jawa Timur), yang menggunakan ulama, ustaz, da'i, santri sebagai alat mobilisasi masa. Tim ini dibuat atas dasar rekomendasi Ijtima Ulama II dan mandat Imam Besar FPI, Habib Rizieq Shihab.

Banyumas sebagai "kandang banteng" juga mengilustrasikan bahwa wilayah ini tidak terikat dengan primordial keagamaan. Hal tersebut menandakan masyarakatnya mayoritas memeluk Islam yang lebih dekat kepada karakteristik Islam *kejawan*. Oleh karena itu, jika dibandingkan dengan ormas Islam lainnya (Muhammadiyah, PA 212 dan FPI), maka NU merupakan ormas Islam terbesar di wilayah ini.

Corak Islam *kejawan* bukan merupakan corak Islam yang kaku. Oleh karena itu, Islam *kejawan* lebih tolerir terhadap keberadaan agama lain. Hal tersebut berpengaruh kepada perkembangan kristenisasi yang cukup kuat di Banyumas. Kristen menjadi agama dengan jumlah pemeluknya terbesar kedua di Banyumas.

Struktur sosio-kultural tersebut merespon perkembangan Salafisme. Hal tersebut karena inti dari ajaran Salafisme adalah pemurnian terhadap *bid'ah*, *syirik* dan *khurafat* yang erat kaitannya dengan Islam *kejawen* dan kristenisasi. Dengan demikian, usaha menempatkan Koppasandi sebagai tim pemenangan Prabowo-Sandi di Banyumas adalah upaya yang tepat. Hal tersebut dikarenakan penggunaan isu agama masih penting digunakan dalam upaya mobilisasi masa. Seperti misalnya warga di daerah pemilihan Kecamatan Baturraden, Kembaran, Sokaraja dan Sumbang yang menyebarkan ungkapan, “*Bu Pak aja pilih sing ora Jumatan ya.*” Ungkapan ini dilontarkan warga ketika ada tim pemenangan dari elemen Kristen melakukan kampanye Jokowi-Ma'ruf. Bahkan ungkapan-ungkapan semacam itu hampir terjadi di seluruh dapil di Banyumas bahkan Cilacap. Pada Pemilihan Bupati (Pilbup) Banyumas 2013, strategi memasang Budi Setiawan, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (Ketua DPC) PDI-P Banyumas dengan latarbelakang Katolik dengan Achmad Husein tidak lain dikarenakan isu agama masih penting di Banyumas. Pada Pilbup 2018, beberapa hari sebelum pencoblosan, puluhan masa yang terdiri dari Barisan Anshor Serbaguna (Banser), FPI dan Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda (Kokam) Muhammadiyah menggeruduk kantor PDI-P Banyumas. Aksi ini dipicu tindakan kader PDI-P yang tidak senang dengan kegiatan *bisyaroh* (salam tempel). Puluhan masa menilai bahwa apa yang telah dilakukan PDI-P mencederai budaya masyarakat Islam di Banyumas.

Berdasarkan kasus-kasus tersebut maka apa yang terjadi di Banyumas menunjukkan bahwa politik identitas dikonstruksikan untuk bermain pada politik elektoral, seperti Pilkada DKI 2017. Identitas dalam pengalaman elektoral di Banyumas menjadi komoditas dalam politik elektoral yang berlangsung. Dengan demikian, realita keragaman agama di Banyumas bukan saja menjadi sebuah khazanah yang unik dan harus disyukuri, melainkan juga berpotensi menimbulkan konflik dan perpecahan. Selain karena kuatnya konstruksi politik identitas dalam politik elektoral di Banyumas sebagai sumber

konflik, politik elektoral yang mengarah kepada perkembangan politik plutokrasi juga menjadi sumber konflik lainnya. Kegiatan politik elektoral yang berbiaya mahal berakibat pada ketergantungan parpol maupun kandidat terhadap sumberdaya materil. Arah perkembangan ini melahirkan elit ekonomi-politik lokal (minoritas elit). Dalam penyelenggaraan politik elektoral di Banyumas, salah satu pebisnis besar adalah dari kelompok minoritas bisnis Arab. Adapun kelompok bisnis Arab yang paling dominan berasal dari keluarga Basalamah. Keluarga Basalamah menguasai bisnis di bidang konstruksi, properti, furnitur, kesehatan hingga pendidikan. Beberapa aktornya adalah Natsir Basalamah, Syafiq Basalamah, Ali Umar Basalamah dan Ali Rofi Basalamah. Mereka berafiliasi dengan kelompok Salafisme terbesar di Banyumas, yaitu Al-Irsyad dan Jaringan Pondok Pesantren Al-Manshuroh Mujur. Selain menjadi pebisnis, terdapat anggota kelompoknya yang sekaligus menjadi aktor politik. Semuanya berafiliasi dengan PKS. Keterlibatan kelompok minoritas bisnis Arab dalam politik praktis lokal secara langsung maupun tidak langsung memperkuat dominasi ekonomi mereka di tingkat lokal. Sehingga konsentrasi kekayaan hanya berputar di sekitaran lingkaran mereka. Hal ini melahirkan gap ekonomi di Banyumas yang berakibat pada pemerataan ekonomi dan kemiskinan. Penguasaan materi oleh kelompok minoritas (*market dominant minorities*) melahirkan kecemburuan mayoritas. Hal tersebut menjadi akar konflik.

METODE

Artikel ini adalah kajian kritis-tematis sosiologis dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan. Dari segi topiknya, penelitian ini merupakan kajian sejarah sosial keagamaan, yang mengkaji tentang penggunaan isu agama dalam dinamika politik elektoral Banyumas pada tahun politik. Dengan pendekatan tersebut penelitian dilakukan dengan meneliti bahan-bahan berupa artikel yang berkaitan dengan menguatnya perkembangan salafisme dan dominasi ekonomi kelompok

bisnis arab di Banyumas. Sebagai pendukung penelitian juga dilakukan dengan menelaah tulisan dalam buku-buku literatur, artikel, berita di media massa dan sebagainya yang berkenaan dengan menguatnya perkembangan salafisme dan dominasi ekonomi kelompok bisnis arab di Banyuma. Sumber data penelitian ini terdiri dari Bahan-bahan non hukum berupa buku, artikel, berita di media massa dan sebagainya yang berkenaan dengan masalah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Banyumas merupakan wilayah yang memiliki variasi topografi mulai dari dataran rendah, dataran tinggi, serta perairan sungai. Dataran rendah berada di wilayah tengah dan menjadi area persawahan. Adapun dataran tinggi dimanifestasikan melalui keberadaan Gunung Slamet di bagian utara, serta perairan sungai di bagian selatan dengan salah satu sungai terbesarnya adalah Serayu. Kebesaran Serayu merentang dari ujung timur dengan muara ujung barat daya di Samudera Hindia. Adapun jika dikalkulasikan bentangan topografi tersebut luasnya mencapai 1.327,59 kilometer persegi atau setara dengan 4,08 persen dari luas keseluruhan Jawa Tengah (Banyumas, 2016). Hal tersebut menjadikan Banyumas sebagai sepuluh besar kabupaten/kota dengan luas wilayah terbesar di Jawa Tengah. Mengacu pada data terakhir (2016) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyumas (Dindukcapil Banyumas), luas wilayah tersebut dihuni penduduk yang jumlahnya mencapai 2.021.062 jiwa. Melalui perbandingan antara luas wilayah dengan jumlah penduduk didapatkan angka kepadatan penduduk mencapai 1.520 jiwa per kilometer persegi. Jika dilihat dari kelompok umur, mayoritas masyarakat Banyumas adalah kelompok umur produktif (15-64 tahun). Adapun jumlahnya mencapai 1.401.723 jiwa atau setara dengan 69,36 persen dari total keseluruhan penduduk Banyumas.

Secara geografis, Banyumas berada di tengah-tengah antara Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Jawa Barat (Jabar). Dua wilayah ini berpengaruh terhadap struktur sosio-kultural Banyumas. Meskipun Banyumas

merupakan salah satu varian dari kebudayaan Jawa, namun budaya Banyumas memiliki karakteristik khusus yang membedakan Banyumas dengan budaya Jawa. Menurut Koentjaraningrat budaya Banyumas berbeda dengan kebudayaan Jawa dalam hal logat Banyumas yang sangat berbeda, bentuk-bentuk organisasi sosial kuno, upacara-upacara sepanjang lingkaran hidup yang khas, folklore yang khas, dan bentuk-bentuk kesenian daerah yang juga khas (Koentjaraningrat, 1984). Selanjutnya, budaya masyarakat Banyumas menunjukkan ciri-ciri yang lebih populis, mengarah ke khalayak banyak dan hal yang baik jika semakin berorientasi ke orang banyak (Marwah, 2014). Hal ini tentu berkebalikan dengan karakteristik Jawa (Mataram) yang elitis dan berorientasi ke arah kekuasaan.

Secara luas, masyarakat Banyumas dikenal memiliki karakter *cablaka* dan *blakasuta* yang merepresentasikan karakter khusus yang dimiliki oleh masyarakatnya. Karakter *cablaka* dan *blakasuta* menjadi karakter inti masyarakat Banyumas yang bersifat khas dan tidak mudah berubah. (Priyadi, 10-16). Sebagai karakter khusus yang mencirikan masyarakat Banyumas, *cablaka* menunjukkan karakter spontan yang dimiliki oleh masyarakat Banyumas, sebagai bentuk respon terhadap sesuatu yang terjadi, dengan menyatakan secara apa adanya dan tidak ditutup-tutupi. Dengan demikian, *cablaka* merupakan karakter yang mengedepankan keterusterangan. Begitu pula dengan istilah *blakasuta* yang juga memiliki makna karakter yang terbuka dan apa adanya. Sebagai karakter masyarakat Banyumas yang paling hakiki, cirri *cablaka* dan *blakasuta* tidak mudah berubah meskipun mereka sudah berinteraksi dengan orang lain yang memiliki latarbelakang budaya yang berbeda (Marwah, 2014). Dari karakter *cablaka* dan *blakasuta* tercermin jiwa egaliter dan jiwa yang bebas yang penting dalam membangun nilai hidup rukun (*brayan urip*).

Sifat dan sikap tersebut disimbolkan dengan tokoh pewayangan Bawor. Keberadaan masyarakat Banyumas yang merefleksikan karakternya dengan simbol Bawor membawa pengaruh dan tata nilai dalam kehidupan

masyarakat. Dalam hal ini, budaya Banyumas berkembang menjadi entitas kebudayaan yang egaliter. Bentuk-bentuk relasi antar individu dipandang terjadi cenderung setara dan kurang mengenal kelas dan kasta. Dari penjelasan inilah yang menjadi poin penting untuk melihat karakter masyarakat Banyumas yang akomodatif terhadap keberadaan kelompok-kelompok yang berbeda. Sehingga menyuburkan perkembangan kebudayaan yang beragam termasuk agama.

Islam menjadi mayoritas agama yang dianut masyarakat Banyumas, yakni mencapai 1.776.070 jiwa. Protestan menjadi agama mayoritas kedua yang mencapai 18.174 jiwa diikuti Katolik di urutan ketiga sebesar 12.759 jiwa, Budha di urutan keempat sebesar 2.431 dan Konghucu di urutan kelima sebesar 87 jiwa. Sedangkan penghayat kepercayaan mencapai 570 jiwa (Banyumas, 2016). Islam sebagai agama mayoritas menyuburkan perkembangan komunitas keagamaan yang berbasis pada nilai-nilai keislaman. Adapun Nahdlatul Ulama (NU) menjadi organisasi Islam tradisional terbesar, Muhammadiyah menjadi organisasi Islam reformis terbesar, dan beberapa kelompok reformis Islam lainnya, seperti Salafiyah, FPI dan Jamaah Tabligh (Banyumas, 2016). Selain komunitas keagamaan mayoritas, di Banyumas juga tumbuh subur komunitas keagamaan minoritas, seperti Jemaat Syi'ah, Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI).

Meskipun Islam sebagai agama mayoritas, namun corak keislaman di Banyumas bukan merupakan corak keislaman yang kaku. Hal ini karena Islam di Banyumas mengalami akulturasi budaya dengan budaya lokal yang kental. Adapun corak keislaman di Banyumas lebih dikenal sebagai sinkretisme Islam (*abangan*). Sehingga masyarakatnya tidak begitu Islamis jika dilihat dalam term Islam puritan. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa nilai-nilai budaya lokal lebih dominan dalam mempengaruhi perkembangan Islam di Banyumas. Hal tersebut karena jauh sebelum penduduk Banyumas memeluk agama Islam, sudah berkembang lebih dahulu sistem kepercayaan. Masyarakat sudah mengakui adanya Tuhan sekaligus berkembang

kepercayaan adanya kekuatan gaib di luar diri manusia. Bentuk pengakuan adanya kekuatan gaib tersebut melahirkan ritus kepercayaan yang mengeramatkan benda-benda gaib atau magis, atau biasa disebut *kejawen*.

Islam Aboge merupakan bentuk dari sinkretisme Islam yang terbesar di Banyumas yang dapat dilihat dari situs dan ritus yang ada di Desa Cikakak. Selain Islam Aboge, terdapat juga kelompok sinkretisme Islam lainnya, yakni Islam Bonokeling yang dapat ditemui di Desa Pekuncen, Kecamatan Pekuncen. Aliran Islam Bonokeling sangat dipengaruhi oleh ajaran Kyai Bonokeling yang menggabungkan kepercayaan *kejawen* kuno dengan nilai-nilai keislaman. Selain itu juga terdapat kelompok *kejawen* lainnya, seperti Hakmaliyat, Himpunan Kebatinan Kawruh Warga, Jawa Deles, Kawruh Tujuh Mulyo dan Perjalanan Luhur.

Dalam perkembangan kontemporer, pesatnya perkembangan aliran kepercayaan dan sinkretisme Islam bahkan kristenisasi di Banyumas merespon perkembangan Islam puritan (Salafisme). Hal ini karena inti utama ajaran Salafisme adalah tauhid yang berarti menerima dan meyakini keesaan Tuhan dan kekuasaan mutlakNya. Oleh karena itu, fokus aktivitas Salafisme tidak hanya sebatas pada tujuan untuk memurnikan ajaran Islam dari praktik-praktik sinkretisme, seperti *bid'ah*, *syirik*, dan *khurafat*, namun juga fokus dalam mengontrol perkembangan ajaran yang berseberangan dengan konsep tauhid yang mereka yakini. Dalam hal ini, kristenisasi.

Struktur Sosio-Ekonomi Banyumas

Berdasarkan adopsi data terakhir BPS Banyumas, kalkulasi APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Banyumas, pada 2017 mencapai 3.221.258.052.890 rupiah. Jumlah ini meningkat cukup signifikan. Pada 2016, kalkulasi APBD Banyumas mencapai 2.852.968.390.190 rupiah dan pada 2015 mencapai 2.652.271.442.280 rupiah. Dari kalkulasi tersebut Pendapatan Asli Daerah (PAD) Banyumas 2017 mencapai 619.701.627.380 rupiah. (Banyumas, 2016).

Besaran pendapatan tersebut belum diserap secara optimal untuk pengadaan lapangan kerja. Pengeluaran terbesar adalah untuk kebutuhan belanja pegawai yang mencapai 1.231.069.947.010 rupiah (Banyumas, 2016). Hal tersebut berdampak pada terbatasnya lapangan kerja yang menjadikan tidak semua pencari kerja segera mendapatkan kerja. Jumlah pencari kerja yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM (Dinnakerkopukm) Banyumas sebesar 9.483 orang. Namun, angka tersebut dirasa dibandingkan dengan penduduk yang tidak melakukan pendaftaran di Dinnakerkopukm. Para pencari kerja tersebut didominasi lulusan Sekolah Menengah Atas dan sederajat (SMA/K). Banyaknya pengangguran menciptakan kesenjangan sosial ekonomi yang berujung pada kemiskinan. Jumlah penduduk miskin di Banyumas mencapai 17.05 persen atau 283.200 penduduk. Persentase penduduk miskin Banyumas jauh lebih tinggi dari rata-rata penduduk miskin Jawa Tengah, 13.01 persen bahkan angkanya lebih besar dari Kabupaten Cilacap, yakni 13.94 persen. Hal tersebut menandakan bahwa pertumbuhan ekonomi di Banyumas tidak dibarengi dengan pemerataan ekonomi. Dalam hal ini berarti sektor-sektor pertumbuhan ekonomi hanya didominasi oleh segelintir orang.

Pertumbuhan ekonomi Banyumas dari tahun 2010 hingga 2016 mencapai 6.21 persen. Persentase ini menempati urutan kedua pertumbuhan ekonomi tertinggi di Jawa Tengah. Tren positif pertumbuhan ekonomi di Banyumas berdampak kepada naiknya pendapatan per kapita penduduk setiap bulannya mencapai 1.994.692 rupiah.

Investasi menjadi faktor signifikan dalam pertumbuhan ekonomi di Banyumas. Berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPP-TSP) Banyumas, realisasi investasi yang terjadi sampai dengan triwulan ketiga tahun 2017 nilainya mencapai 314.278.765.731 rupiah (Marwah, 2014). Nilai tersebut terdiri dari investasi modal asing sebesar 53.449.250.000 rupiah dan investasi modal dalam negeri sebesar 260.779.515.713 rupiah. Adapun besaran

investasi tersebut berada pada sektor perumahan, kawasan perindustrian dan perkantoran atau sub sektor real estate. Sektor ini menyumbang 39 persen nilai realisasi investasi atau setara dengan 121.147.572.000 rupiah. Besarnya angka investasi yang menasar pada sektor perumahan, kawasan perindustrian dan perkantoran merupakan dampak dari kondisi demografi Banyumas yang besar jumlahnya. Hal tersebut menjadi stimulus bagi para investor atau pengembang untuk menyediakan kebutuhan masyarakat, khususnya dalam sektor perumahan. Terhitung dalam kurun waktu 2012-2016, jumlah investor dalam sektor perumahan berjumlah 105 pengembang (Marwah, 2014). Dengan penggunaan lahan mencapai 1.502.084 meter persegi dengan jumlah hunian di atas lahan tersebut mencapai 8.093 unit.

Dinamika Peta Kekuatan Politik Banyumas

Partai dengan ideologi nasionalis merupakan representasi partai yang dominan di Banyumas. Meskipun Islam menjadi agama mayoritas masyarakat Banyumas, namun secara politik wilayah tersebut merupakan “basis merah.” Sejak diselenggarakannya Pemilu 1955, yang diikuti Partai Nasionalis Indonesia (PNI), Partai Komunis Indonesia (PKI), Nahdlatul Ulama (NU) dan Masyumi, partai nasionalis (PNI) selalu dominan.

Temuan Herbert Feith menyebutkan pada Pemilu 1955, Karesidenan Banyumas dimenangkan oleh partai nasionalis (PNI) dengan perolehan suara 48,57 persen. Kemenangan ini tiga kali lipat dari pesaing terdekatnya, NU yang memperoleh suara hanya 19,97 persen. Pencapaian PNI di Karesidenan Banyumas melebihi persentase perolehan PNI yang dimenangkan di Jawa Tengah dengan mendapatkan suara terbanyak yaitu 33,92 persen atau 3.019.568 suara. Kemenangan di Jawa Tengah merupakan pencapaian yang tertinggi dari seluruh suara yang diperoleh PNI secara nasional (15 daerah pemilihan). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Jawa Tengah merupakan basis kaum nasionalis, terutama untuk daerah “pedalaman.”

Dominasi PNI di Karesidenan Banyumas diikuti oleh NU dan PKI yang memperoleh suara hampir berimbang. NU mendapatkan suara sebesar 19,96 persen dan PKI 18,27 persen. Kondisi ini menggambarkan bahwa partai nonagama mendominasi perolehan suara di Karesidenan Banyumas (Marwah, 2014). Sementara itu, Masyumi yang menduduki peringkat empat di Banyumas bahkan Jawa Tengah menunjukkan bahwa Masyumi memang kurang memiliki akar yang kuat di Banyumas. Meskipun Masyumi menempati urutan kedua perolehan suara nasional di bawah PNI. Hal ini berarti, Masyumi tidak memiliki basis masa yang kuat di Jawa, tetapi sangat kuat di luar Jawa (Marwah, 2014).

Pada era Orde Baru, penetrasi kekuasaan yang dilakukan telah mengubah konstelasi politik seluruh daerah di Indonesia, termasuk wilayah Banyumas. Sebagai partai yang merepresentasikan penguasa, Golongan Karya (Golkar) bertugas untuk memenangkan seluruh pemilu di semua daerah. Golkar menjadi partai pemenang pemilu melalui penggunaan sumber daya politik, ekonomi dan sosial secara masif sejak Pemilu 1971. Penyelenggaraan Pemilu 1971 yang diikuti oleh 10 parpol dimenangkan oleh Golkar dengan perolehan suara 62,82 persen. Selanjutnya mulai Pemilu 1977, pemilu hanya diikuti PPP (Partai Persatuan Pembangunan), Golkar dan PDI yang dibentuk melalui kebijakan fusi parpol sesuai Undang-Undang Nomor 3 tahun 1975. Golkar memenangkan perolehan suara secara nasional sampai Pemilu 1977. Sementara itu, di Banyumas yang dikenal sebagai “basis merah,” dominasi Golkar sebagai representasi partai pemerintah tidak menghilangkan kesan tetap kuatnya “merah” di wilayah tersebut. Pada pileg 1987 dan 1992 di Banyumas misalnya, secara berturut-turut kemenangan Golkar diikuti oleh PDI sebagai representasi PNI yang menjadi simbol nasionalis.

Ketika era reformasi menjadi ruang terbuka bagi kelahiran berbagai parpol, sebagian di antaranya merupakan reinkarnasi parpol di masa lalu dan sebagian lainnya dibentuk oleh organisasi sosial, kelompok kepentingan atau

yang lainnya. PDI-P menjadi reinkarnasi PNI, PKB menjadi reinkarnasi NU. Meskipun sulit diidentifikasi, setidaknya PAN (Partai Amanat Nasional), PPP dan PSII (Partai Syarikat Islam Indonesia) dapat dikatakan sebagai reinkarnasi Masyumi. Berkaitan dengan hal tersebut, Herbert Feith percaya bahwa dalam pelaksanaan pemilu di Banyumas di era reformasi, politik aliran masih kuat berlaku. Dalam hal ini, pilihan terhadap parpol lebih banyak dipengaruhi oleh faktor kepercayaan dan kecurigaan daripada faktor program-program yang diusung parpol. (Feith, 1999)

Era reformasi semakin membuktikan keberadaan Banyumas sebagai basis “merah” (kandang banteng), secara politik sejak digelarnya Pemilu 1955. Dalam hal ini, PDI-P selalu menduduki peringkat teratas. Pada Pemilu 2004 dan 2009 misalnya, PDI-P memenangkan pileg di Banyumas dengan perolehan suara 35,01 persen dan 26,17 persen. Masing-masing perolehan suara itu dua kali lipat dari pesaing terdekatnya Partai Golkar 18,07 (2004) persen dan Demokrat 13,53 persen (2009). Padahal pada Pemilu 2004, Partai Golkar menjadi pemenang pemilu secara nasional dengan perolehan suara 21,58 persen. PDI-P di Banyumas juga mengungguli Partai Demokrat yang merupakan partai pemenang Pileg 2009 secara nasional. Dominasi PDI-P semakin kuat, pada Pemilu 2014, PDI-P memenangkan pileg di tingkat Banyumas dengan perolehan suara mencapai 288.354 suara. Perolehan suara ini mengantarkan PDI-P meraih 16 kursi dari 50 kursi yang diperebutkan di parlemen Banyumas. Jumlahnya hampir tiga kali lipat dengan lawan politiknya, Gerindra yang hanya memperoleh 6 kursi parlemen. Perolehan suara PDI-P di Banyumas menyumbang perolehan suara yang signifikan di Jawa Tengah dengan perolehan suara 4.295.598. Perolehan suara di Jawa Tengah juga berpengaruh signifikan secara nasional. Perolehan suara ini di wilayah memberikan gap sebesar 33,3 persen kepada penantangannya. PDI-P sebagai partai pengusung Joko Widodo dan Jusuf Kalla meraih suara sebesar 66,65 persen atau 12.959.540. Sementara itu, Partai Gerindra sebagai partai pengusung

Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa meraih suara sebesar 33,35 persen atau 6.485.720 persen. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perolehan suara di Jawa Tengah, khususnya Banyumas berpengaruh signifikan terhadap kemenangan PDI-P secara nasional.

Asal-Usul dan Perkembangan Komunitas Arab di Banyumas

Pada abad ke-15 Masehi, Islam mulai menerobos kota-kota perdagangan di pesisir utara Pulau Jawa (Kesheh, 2007). Masuknya Islam melalui rute perdagangan ini dapat dipastikan bahwa awal penyebarannya dibawa oleh para pedagang, yang kemudian disusul dengan membentuk semacam koloni-koloni Islam di pesisir Jawa. Para pedagang yang menyebarkan agama Islam tersebut hampir seluruhnya merupakan migrasi dari Hadramaut, sebuah wilayah tandus di Arab bagian selatan yang kini menjadi wilayah kekuasaan Yaman.

Keberhasilan migrasi Arab Hadramaut menuju Indonesia ini didukung dengan perkembangan rute perdagangan yang menghubungkan antara Arab Selatan dan kepulauan Asia Tenggara, pada abad ke-7

masehi. Aceh kemungkinan menjadi wilayah pertama tempat singgahnya para migrasi ini. Di Aceh sudah dapat dipastikan bahwa sejak abad ke-13 Masehi, telah terdapat kerajaan Islam pertama di Indonesia. Migrasi Arab di Indonesia kemudian menuju ke Palembang, Sumatera Selatan, dan Pulau Jawa.

Arus gelombang besar datangnya migrasi Arab Hadramaut terjadi pada pertengahan abad ke-19 Masehi. Hal itu terjadi menyusul dibukanya Terusan Suez dan rute kapal uap yang menghubungkan Arab dan Indonesia. Hal ini turut meningkatkan jumlah pemukiman-pemukiman Arab di utara kepulauan Indonesia yang diikuti dengan lonjakan migrasi Arab yang signifikan pada tahun 1859 sampai 1885. Pada tahun 1859, jumlah migrasi Arab sebanyak 7.786. Sampai pada tahun 1885, jumlahnya telah mencapai 20.501 jiwa. Mengalami lonjakan hampir sebesar tiga kali lipat (Kesheh, 2007). Jadi, tahun inilah awal dari masa baru yang sepenuhnya bagi koloni-koloni Arab di Indonesia. Pada tahun 1859 hingga 1870, secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini (Berg, 1989)

Tabel 1. Penduduk Arab di Indonesia Tahun 1859-1870

Karesidenan	Kota	Arab lahir di Arab		Arab lahir di Indonesia			Jumlah
		Laki-laki	Anak	Laki-laki	Perempuan	Anak	
Cirebon	Cirebon	131	-	163	157	383	834
	Indramayu	63	-	69	46	196	374
	Jatiwangi	-	-	2	-	-	2
Semarang	Semarang	30	-	164	130	276	600
	Salatiga	-	-	5	1	12	18
	Ambarawa	-	-	17	12	25	54
	Purwodadi	-	-	1	-	-	1
Jepara	Pati	-	-	11	4	10	25
	Jepara	-	-	2	2	8	12
	Kudus	-	-	2	2	8	12
	Juana	-	-	2	1	6	9
Surabaya	Surabaya	218	10	220	236	461	1145
	Gresik	50	15	248	411	143	867
	Mojokerto	4	-	1	-	6	11
	Sidoarjo	3	-	6	2	16	27

	Sidayu	-	-	3	1	2	6
Tegal	Tegal	154		28	38	132	352
Pekalongan	Pekalongan	123	10	160	290	174	757
	Cilacap	-	-	2	-	5	7
Banyumas	Purwokerto	-	-	1	-	2	3
	Purbalingga	-	-	1	-	3	4
Yogyakarta	Yogyakarta	2	-	29	9	12	52
Surakarta	Surakarta	3	-	29	10	29	71
	Jakarta	457	19	198	224	550	1448
Jakarta	Jatinegara	19		14	5	48	86
	Bogor	31		12	15	39	97
	Tangerang	1		4	5	21	31

Sumber: L.W.C van den Berg, *Le Hadhramaout Et. Les Colonies Arabes*

Menurut data statistik di atas, di Pulau Jawa terdapat enam koloni besar Arab, yakni Jakarta, Cirebon, Tegal, Pekalongan, Semarang, dan Surabaya. Koloni Arab di Jakarta, menjadi koloni terbesar di Indonesia. Berdasarkan golongan, maka golongan *sayyid* menjadi golongan Arab minoritas. Para pendatang Arab yang datang ke Pulau Jawa kebanyakan berasal dari Singapura. Mereka terlebih dahulu singgah di Jakarta, kemudian menyebar ke daerah-daerah lain.

Jika dilihat dari kondisi geografis wilayahnya, maka Banyumas (Purwokerto) terletak di antara empat koloni Arab terbesar di Pulau Jawa pada akhir abad ke-19, yakni Cirebon, Tegal, Pekalongan dan Semarang. Koloni Arab di Tegal mencapai 352 jiwa, di Pekalongan mencapai 757 jiwa dan Semarang mencapai 673 jiwa. Kemungkinan, koloni Arab yang ada di Purwokerto merupakan pendatang dari empat wilayah koloni Arab terbesar tersebut.

Pada awal kedatangannya di Banyumas para perantau Arab ini biasanya menetap di kawasan di mana mereka dapat menemukan sanak saudara atau imigran lain yang sudah lama menetap di sana. Hal ini dilakukan untuk mempermudah mereka membentuk sebuah komunitas yang mana hal tersebut penting untuk mempermudah mereka dalam mencari pekerjaan. Bagi mereka yang baru, biasanya mereka merintis karir dengan menjadi asisten

atau penjaga toko, yang kemudian uang hasil bekerja tersebut dijadikan sebagai modal untuk menjadi pedagang mandiri. Sebagian menjadi pedagang perantara dengan membeli barang impor dari firma Eropa yang besar dan menjualnya kembali ke pedagang lain atau konsumen Indonesia, yang umumnya mencakup komoditas tekstil. Hingga akhirnya pola kehidupan ekonomi mereka berkembang. Beberapa di antaranya mendapatkan keuntungan dari riba (sebagian kecil), ada juga yang mengambil peluang untuk berinvestasi properti, sebagian lagi dari mereka bahkan menjadi tuan tanah (Geertz, 1989).

Menabung merupakan budaya bagi orang Arab Hadramaut. Hal ini turut mengantarkan mereka kepada kemakmuran dalam berdagang. Begitu mereka menjadi makmur, mereka hampir tidak pernah melupakan anggota keluarga lainnya untuk berbagi kemakmuran yang sudah didapatkan. Gagasan seperti ini, yakni kekayaan seseorang harus dinikmati seluruh anggota keluarga yang lain sudah menjadi nilai budaya yang mendarah daging. Bahkan bagi mereka yang tidak mengindahkan kewajiban moral ini, mereka akan dihinakan oleh semua rekan sebangsanya. Sedangkan apabila seluruh anggota keluarganya sudah makmur semua, mereka menyumbangkan kelebihan uangnya kepada masjid, sekolah atau ke yayasan yang mendorong penyebaran Salafisme.

Dominasi Kelompok Bisnis Arab dan Perkembangan Salafisme

Keberhasilan para perantau Arab yang umumnya adalah laki-laki ini, juga dikarenakan keberhasilan mereka dalam melakukan asimilasi dengan warga pribumi. Hal itu diwujudkan dengan menikahi perempuan-perempuan pribumi dan membentuk aliansi-aliansi dengan keluarga-keluarga yang berkuasa. Hal ini yang memberikan akses kepada mereka untuk dapat menduduki jabatan-jabatan strategis politik.

Penguasaan dalam jabatan-jabatan strategis politik semakin menguat dengan adanya desentralisasi yang membuka akses penyelenggaraan pemilihan umum di tingkat daerah. Konsekuensinya pedagang Arab, menjalin hubungan yang erat dengan sebagian kecil politisi bahkan menjadi politisi pemerintahan. Hubungan ini terjalin atas dasar simbiosis yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Di satu sisi para politisi membutuhkan sokongan yang kuat dari sisi ekonomi dan finansial untuk melanggengkan kekuasaannya. Namun, di sisi lain, pedagang Arab membutuhkan kondusifitas politik dan perlindungan keamanan dalam menjalankan aktivitas ekonominya. Bantuan dari para pebisnis ini tentu saja berimplikasi secara politis. Bentuk pendanaan semacam itu, dapat dikategorikan sebagai *bribes and kick-back* (sogokan dana agar bisnis mereka dipermudah). Timbal balik ekonomi yang didapat pelaku bisnis dari para politisi dapat berupa konsesi bisnis melalui tender-tender pemerintah, keringanan pajak, kebijakan pemerintah dan peraturan yang memudahkan bisnis mereka. Hal tersebut memicu terbukanya *free market economies* (pasar bebas demokrasi) yang justru memicu munculnya *market-dominant minorities* (pasar dominan minoritas), yaitu minoritas kaya, dalam hal ini pedagang Arab, yang mendapatkan kekayaannya karena sistem ekonomi pasar (Katherine A. Piatti, 2004). Kelompok minoritas ini memiliki akses ekonomi yang besar, mampu dan berhasil menguasai ekonomi secara keseluruhan di tingkat local (Dermawan, 2013).

Hampir semua bidang bisnis yang digeluti oleh keluarga Basalamah dirintis di tahun jauh

sebelum era desentralisasi. Jaringan bisnis keluarga Basalamah dirintis pada tahun 1960an. Bidang bisnis yang pertama ditekuni adalah tekstil, jual-beli kain sarung oleh Abdullah Basalamah dan Umar Basalamah. Keberhasilan menekuni usaha jual-beli sarung, sebagian penghasilannya ditabung dan kemudian merintis usaha kedua di bidang jual-beli material dengan membuka toko besinya masing-masing. Toko besi Abdullah Basalamah bernama "Toko Besi Gunung Jati," dan milik adiknya, Umar Basalamah "Toko Besi Prapatan." Dari kesuksesan keduanya membuka usaha toko besi inilah, kemudian dilanjutkan oleh anak keturunan mereka.

Perkembangannya semakin pesat di era desentralisasi. Berawal dari modal yang berasal dari orang tuanya, saat ini Natsir Basalamah telah memiliki tiga jenis usaha yang berbeda, yakni di bidang konstruksi, industri dan jasa. Keberhasilan Natsir Basalamah ini karena dirinya sering mendapatkan tender-tender milik pemerintah daerah (pemda). Hal ini karena, sosoknya dikenal selalu dekat dengan otoritas kekuasaan di Banyumas. Bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Banyumas, Natsir Basalamah menggarap proyek pembangunan Pasar Ajibarang dan pada ada tahun 2000an. Natsir Basalamah juga diberikan kepercayaan untuk menggarap tender dari PT. KAI (Kereta Api Indonesia) Purwokerto, pembuatan jalur kereta api dua arah (*double track*) se-Jawa Tengah bagian selatan hingga Tegal. Bahkan Natsir Basalamah yang juga salah satu pemilik Varia Usaha Beton (VUB) melakukan pengadaan batu-batu berukuran kecil sebagai bantalan rel kereta sepanjang rute tersebut. Selain itu, juga beberapa kali dipercaya sebagai pihak pengadaan genteng dan *paving block* di lingkungan pemda.

Sementara itu, Syafiq Basalamah, adik Natsir Basalamah memulai bisnisnya pada pertengahan tahun 1990an, tahun di mana merintis bisnis hanya mengontrak ruko (rumah toko) di pinggir jalan provinsi di Banyumas dengan membuka klinik kesehatan (lokasi ini sekarang menjadi kompleks Rumah Sakit Siaga Medika Banyumas). Sebelum akhirnya saat ini telah membuka tiga cabang di tiga kabupaten

yang berbeda, yakni Rumah Sakit Siaga Medika Banyumas, Rumah Sakit Siaga Medika Purbalingga dan Rumah Sakit Siaga Medika Pematang.

Sementara itu, Ali Umar Basalamah yang merupakan anak dari Umar Basalamah sebagai suksesor Toko Besi Prapatan, usahanya berkembang dengan mendirikan perusahaan properti, PT. Griya Satria, yakni perusahaan perumahan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. Melalui PT Griya Satria, dirinya menangani beberapa proyek yang bekerjasama dengan pihak pemerintah daerah, seperti pembangunan Rumah Sakit Ajibarang, pada tahun 2000an, dan pembangunan Pasar Pratistahasta, Pereng, Purwokerto, pada tahun 2010. Selain itu, Ali Umar Basalamah juga dipercaya membangun gedung perkuliahan Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) dan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, seperti Auditorium Graha Widyatama, Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), Fakultas Ilmu Budaya (FIB), Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK). Sedangkan Ali Rofi Basalamah yang merupakan keponakan Ali Umar Basalamah yang berasal dari Cirebon, pada awalnya bekerja sebagai pegawai di PT. Griya Satria. Hingga akhirnya diawal tahun 2000an, dia merintis bisnisnya sendiri dan mendirikan PT. Sapphire Grup. Saat ini, PT. Sapphire Grup perkembangannya lebih pesat dari PT. Griya Satria dan menjadi perusahaan properti terbesar di Banyumas. Atas kedekatannya dengan Bupati Banyumas, Mardjoko, pada tahun 2013 PT. Sapphire Grup berhasil mendirikan perumahan di Desa Wiradadi, Kecamatan Sokaraja, bernama "Sapphire Mediteranian." Meskipun tidak berlandaskan perizinan yang memadai, namun tetap bisa berdiri bangunan dengan tipe perumahan kelas menengah atas tersebut. Melihat beberapa kasus yang melibatkan beberapa anggota keluarga Basalamah, dapat dikatakan hampir tidak mungkin seluruh anggotanya yang menjalankan bisnis tidak memiliki hubungan dengan pemangku kekuasaan setempat.

Struktur sosio-ekonomi Banyumas yang mengarah kepada perkembangan investasi pada sektor perumahan, kawasan industri dan perkantoran atau sub sektor real estate memberikan stimulus terhadap perkembangan bisnis hingga saat ini. Nilai realisasi investasi di bidang ini mencapai 121.147.572.000 rupiah atau setara dengan Sektor ini bahkan menyumbang 39 nilai realisasi di Banyumas. Meskipun jumlah investor dalam sektor perumahan terus bertambah (pada data terakhir, 2012-2016 berjumlah 105 pengembang) tapi sektor bisnis tersebut masih didominasi oleh Ali Umar Basalamah (PT. Griya Satria) dan Ali Rofi Basalamah (PT. Sapphire Grup). Jika perusahaan lain mengalami stagnansi pembangunan, hingga saat ini PT. Griya Satria dan PT. Sapphire Grup masih aktif menggarap proyek-proyek perumahan di Banyumas. Adapun proyek terbaru yang sedang digarap PT. Griya Satria adalah Griya Satria Mandalatama, Griya Satria Bukit Nirwana, Griya Satria Bukit Permata, Grand Kaliori Hills dan Griya Satria Pesona Sumampir. Sedangkan proyek terbaru yang sedang digarap PT. Sapphire Grup adalah Shamara Wiradadi, Sapphire Madani Purwokerto, Sapphire Mansion Purwokerto dan Sapphire Boutique Purwokerto. Perkembangan PT. Sapphire Grup selangkah lebih maju dari pengembang lainnya, yang mana perusahaan tersebut sudah mulai menjual konsep rumah pintar (*smart home*). Konsep ini menjadi yang pertama di Banyumas.

Kekayaan material yang terkonsentrasi pada minoritas selalu mengundang ancaman dari pihak luar yang ingin menguasai atau mendistribusikan ulang kekayaan tersebut. Oleh karena itu, sebagai wujud mempertahankan kekayaannya, para pebisnis dituntut untuk dapat terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam aktivitas politik. Semakin tinggi kebutuhan untuk mempertahankan kekayaan, maka terjadi kecenderungan para pebisnis akan semakin banyak terlibat dalam kekuasaan politik. Hal sebaliknya, apabila dalam sebuah sistem politik, hak milik dan kekayaan dilindungi secara ketat, maka para pebisnis bisa saja tidak perlu terlibat secara aktif dalam perebutan

kekuasaan. Hubungan ini digambarkan Robison dan Hadiz sebagai sistem relasi kekuasaan yang memungkinkan konsentrasi kekayaan dan otoritas serta pertahanan kolektif atas konsentrasi kekayaan. (Hadiz, 2014)

Pada Pileg 2014, Ali Umar Basalamah mencalonkan diri melalui mesin Partai Golkar (Golongan Karya) dan bertarung di Dapil I Banyumas. Ali Umar Basalamah memang pebisnis lama, namun dalam politik praktis, sosoknya merupakan aktor politik baru di Banyumas. Dari jumlah perolehan suara Golkar sebanyak 25.868 di Dapil I, sekitar 14.000 suara berasal dari peran individu Ali Umar Basalamah. Perolehan suara ini mengantarkannya kepada satu-satunya caleg Golkar yang lolos ke parlemen di Dapil I. Setidaknya perolehan suara individunya juga menyumbang perolehan suara Golkar secara signifikan, yakni mencapai 11,9 persen dari 116.830 perolehan suara Golkar di Banyumas. Perolehan suara ini menempatkan Golkar sebagai partai pemenang kedua pada Pileg 2014 Banyumas.

Besarnya jumlah perolehan suara Ali Umar Basalamah meskipun sebagai caleg pendatang baru di Banyumas disinyalir didukung sumber pendanaan yang kuat. Dana kampanye yang dikeluarkan sejumlah miliaran rupiah, yang terdiri dari dana pribadi dan dukungan kelompok bisnis Arab keluarga Basalamah. Dana tersebut terbilang fantastis mengingat pencalonannya hanya di tingkat kabupaten. Hal ini karena, rata-rata biaya kampanye untuk caleg tingkat provinsi saja mencapai 320 juta-3 miliar rupiah.

Pada Pileg 2019, terdapat tiga caleg dari PKS yang bertarung di dapil yang sama (Dapil I Banyumas) yang memiliki afiliasi dengan Ali Rofi Basalamah. Adapun di antaranya; yaitu 1) Fahmi Nahdi Bisir, caleg PKS nomor urut 2 (dua), Direktur PT. Putera Perwira Dirgantara, sebuah perusahaan di bidang konstruksi merupakan kolega bisnis Ali Rofi Basalamah; 2) Ma'sum Al Ghozali, caleg PKS nomor urut 3 (tiga) merupakan mantan anak buah Ali Rofi Basalamah dan juga salah satu pemilik PT. Emerald Sakha Graha, sebuah perusahaan properti Banyumas; 3) Slamet Riyadi, caleg PKS nomor urut 5 (lima) yang merupakan mertua Ali

Rofi Basalamah. Ketiganya berebut dukungan dari Ali Rofi Basalamah. Namun, di detik-detik terakhir pemilihan, Ali Rofi Basalamah menyatakan sikap dukungan kepada mertuanya dan menginstruksikan seluruh jajaran Sapphire untuk mendukung pemenangnya.

Konsentrasi kekayaan dan kekuasaan yang terjadi pada pengusaha Arab, mendorong terciptanya alokasi kekayaan yang semakin besar. Alokasi kekayaan tersebut sebagian besar digunakan untuk mendukung kemajuan situs-situs keagamaan yang mereka kelola, maka misi penyebaran ini Salafisme, akan semakin signifikan

Dalam perkembangan Salafisme di Indonesia, Banyumas menjadi salah satu pusat penyebaran Salafisme di Jawa Tengah. Perkembangan Salafisme di daerah ini sangat dipengaruhi oleh yayasan dan pesantren Salafi yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Pada akhir 1990an berdiri Pondok Pesantren Al-Manshuroh Mujur, Yayasan Al-Furqon (Kalibagor) dan Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Purwokerto (Al-Irsyad Purwokerto). Dalam hal ini, Pesantren Al-Manshuroh didirikan oleh para santri lulusan Pesantren Ihya'us Sunnah Yogyakarta. Salah satu pesantren yang paling berpengaruh di Indonesia dalam proses penyebaran Salafisme. Pesantren ini didirikan oleh salah satu santri Salafi pertama di Indonesia, yaitu Ja'far Umar Thalib, yang merupakan Panglima Laskar Jihad.

Perkembangan yayasan, pesantren, sekolah, masjid dan musala Salafi tersebut sejalan dengan perkembangan kelompok bisnis keluarga Basalamah. Syafiq Basalamah merupakan donatur utama Pondok Pesantren Al-Manshuroh Mujur. Awalnya (1993) kegiatan pondok pesantren dilakukan disebuah musala dengan ukuran sangat kecil bernama "as-Salaam milik Muhammad Solehan (ayah dari Sanin Hasanudin, Pembina Pondok Pesantren Al-Manshuroh Mujur). Pada tahun ini, perkembangan bisnis Syafiq Basalamah masih sebatas membuka klinik kesehatan di pinggir jalan dengan menyewa sebuah ruko. Pada 2002, sedikit demi sedikit Pondok Pesantren Al-Manshuroh Mujur mendirikan Sekolah Dasar

Islam Terpadu (SDIP) Al-Manshuroh Mujur. Dua tahun kemudian, dari hasil donasi dari beberapa pengurus termasuk Syafiq Basalamah, Pondok Pesantren Al-Manshuroh Mujur membeli sebidang tanah seluas 32,5 meter persegi. Di atas tanah tersebut dibangun rumah kayu berdinding anyaman bambu yang dijadikan asrama para santri. Berkat ketokohan Syafiq Basalamah, Pondok Pesantren Al-Manshuroh Mujur menerima dana dari Pemda Cilacap sebesar 80 juta rupiah, melalui Hanafi, politisi PAN sebagai bentuk dana aspirasi konstituen. Dana tersebut digunakan untuk membangun kantor pesantren yang terletak di sebelah utara masjid besar yang juga didirikan oleh Syafiq Basalamah. Masjid ini bisa menampung ratusan jamaah dalam satu waktu solat. Dana yang dikeluarkan untuk membangun masjid tersebut jika diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Terdapat pula badan usaha air minum milik Pondok Pesantren Al-Manshuroh Mujur yang masih menjadi satu kompleks dengan masjid.

Dalam perkembangan terakhir, donasi yang berhasil dikumpulkan salah satunya berasal dari Syafiq Basalamah sebesar 838 juta rupiah. Sejumlah uang tersebut digunakan untuk perluasan wilayah yang sekarang dibangun kantor, masjid dan tempat tinggal para santri dan tenaga pengajar beserta pengurus. Perkembangan Pondok Pesantren Al-Manshuroh Mujur sekarang telah memiliki jenjang pendidikan dari tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA). Bahkan Pondok Pesantren Al-Manshuroh Mujur telah membangun cabangnya di Kota Cilacap, dengan Masjid Al-Jihad sebagai simbol keberadaannya. Dan, cabang kecil di Kalibagor bernama Yayasan Al-Faruuq dan membangun masjid besar bernama "Al-Furqon" di Purwokerto Selatan.

Selain itu, hubungan dengan latarbelakang hubungan keluarga, Pondok Pesantren Al-Manshuroh Mujur juga mendapatkan sokongan dana dari Al-Irsyad Purwokerto, yang mana dalam pembangunannya sangat bergantung pada donasi yang berasal dari Natsir Basalamah, Ali Umar Basalamah dan Ali Rofi Basalamah.

Pondok Pesantren Al-Manshuroh Mujur baru-baru ini juga mendirikan masjid berukuran sedang di depan kompleks sekolah dasar (SD) Al-Irsyad Purwokerto.

Al-Irsyad Purwokerto merupakan yayasan Salafi terbesar di Banyumas. Kebesaran Al-Irsyad dilihat tadi banyaknya jumlah masjid besar dan musala-musala berukuran sedang di pedesaan yang dibangun atas donasi yang mereka kumpulkan. Beberapa masjid berukuran besar tersebut, seperti Masjid Besar Jenderal Soedirman, Masjid Tjujuhbelas dan Masjid Fatimatuz Zahra di Purwokerto Utara. Al-Irsyad juga memiliki institusi pendidikan dari tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA). Perkembangan Al-Irsyad di Purwokerto bahkan menjadi percontohan bagi perkembangan Al-Irsyad di seluruh Indonesia.

Pembangunan Masjid Fatimatuz Zahra yang berada di kompleks Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) diperkirakan menghabiskan dana sebesar 15 miliar rupiah. Sedangkan Masjid Besar Jenderal Soedirman, yang baru-baru ini beroperasi diperkirakan menghabiskan dana sebesar 12 miliar. Sementara itu, Masjid Tjujuhbelas ukurannya lebih kecil dari Masjid Fatimatuz Zahra dan Masjid Besar Jenderal Soedirman, sehingga diperkirakan dana yang dikeluarkan lebih sedikit, namun masih berkisar miliaran rupiah. Sedangkan musala berukuran sedang berjumlah yang telah dibangun di pedesaan-pedesaan di wilayah Banyumas ditaksir nilainya ratusan juta rupiah per unit. Dengan demikian, kebangkitan ekonomi dalam pengertian ini integral dengan pesatnya perkembangan Salafisme di Banyumas.

Konflik Politik Elektoral di Banyumas

Masyarakat Banyumas dikenal sebagai karakter yang *cablaka* dan *blakasuta*. Dua karakter identik ini membangun sistem kemasyarakatan di Banyumas yang egaliter yang dimanifestasikan melalui nilai hidup *brayan urip* (teman hidup). Oleh karena itu, masyarakat Banyumas dikenal dengan tatanan masyarakat yang harmonis. Namun demikian keharmonisan tersebut tidak selamanya panjang umur. Dalam

hal ini, terdapat dua akibat yang dapat meruntuhkan nilai hidup *brayan urip* secara signifikan, yaitu perkembangan Salafisme dan dominasi ekonomi oleh kelompok minoritas.

Perkembangan Salafisme bertolak belakang dengan struktur sosio-kultural asli masyarakat Banyumas yang memiliki corak Islam *kejawen* (tidak kaku). Tidak kaku berarti lebih tolerir terhadap perkembangan agama lain di luar Islam, dalam hal ini Kristen. Oleh karena itu, agama Kristen di Banyumas menjadi agama terbesar kedua. Sementara itu, Salafisme merupakan corak Islam murni yang tujuannya adalah untuk memurnikan ajaran Islam dari *bid'ah*, *syirik* dan *khurafat* yang mana hal tersebut sangat dekat kaitannya dengan ritual-ritual keagamaan Islam *kejawen* dan Kristen. Inti utama ajaran Salafisme adalah tauhid, yang berarti menerima dan meyakini keesaan Tuhan dan kekuasaan mutlakNya. Ajaran ini terangkum dalam "*La ilaha illa Allah*" (Tidak ada Tuhan selain Allah). Oleh karena itu, fokus aktivitas Salafisme salah satunya adalah mengontrol perkembangan ajaran yang berseberangan dengan konsep tauhid seperti perbedaan konsepsi Tuhan dalam dimensi kepercayaan Salafisme, dalam hal ini Kristen. Dengan demikian, perkembangan Salafisme di Banyumas secara tidak langsung bertujuan untuk merubah sosio-kultural asli Banyumas, hal ini menjadi sumber pertentangan masyarakat Banyumas yang berujung pada konflik.

Masjid Besar Jenderal Soedirman baru-baru ini didirikan di antara dua gereja terbesar di Banyumas, yaitu Gereja Kristen Indonesia (GKI) dan Gereja Katedral. Dalam proses pembangunannya sempat dibumbui konflik bahkan hingga saat ini. Konflik bermula ketika pihak Masjid Besar Jenderal Soedirman akan membangun menara untuk pengeras suara. Namun, karena lokasinya yang berseberangan dengan lokasi Gereja Katedral, rencana tersebut tidak disetujui. Masalah ini kemudian dimediasi oleh aparat Tentara Nasional Indonesia (TNI) karena memang masjid ini berdiri di atas tanah milik TNI. Selain itu, pembangunan Masjid Besar Jenderal Soedirman juga sempat ditolak oleh Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang

lokasinya berjarak sekitar 500 meter dari lokasi. Akibat dari pembangunan Masjid Besar Jenderal Soedirman, JAI merasa kehilangan jemaatnya dan mengeluhkan sepi masjidnya. Selain itu, mereka juga sering dipojok-pojokkan sebagai aliran sesat dan menyesatkan, namun hal tersebut tidak berujung pada persekusi seperti yang terjadi di Jawa Barat dan Sampang. Sementara itu, Masjid Al-Furqon didirikan tidak jauh dari salah satu tempat prostitusi terbesar di Banyumas dan juga berdekatan dengan Gereja Bethel Indonesia (GBI). Sempat terjadi penolakan oleh warga sekitar pada awal pembangunannya. Puncaknya ketika kasus terorisme sedang mencuat, masjid ini sempat dicurigai warga sebagai masjid teroris karena tampilan jemaatnya menyerupai tampilan teroris pada umumnya. Sedangkan Masjid Tujuhbelas lokasinya berdekatan dengan rumah peribadatan umat Katolik.

Pada perkembangan terbaru, Al-Irsyad Purwokerto mendirikan *boarding scholl* di Baturraden. Lokasinya berdekatan dengan Taman Rekreasi Caping Park, milik PT. Sapphire Grup. *Boarding Scholl* dan Caping Park berdiri di atas lahan milik Ali Rofi Basalamah seluas 45 hektare. Pembangunan *boarding scholl* sampai sekarang masih dihiasi penolakan oleh kalangan Nahdhiyin karena disinyalir dapat mengganggu keberadaan kelompok mereka.

Pemilihan lokasi perkembangan Al-Irsyad Purwokerto di Baturraden juga karena wilayah ini dikenal dengan kleniknya. Ada beberapa tempat yang dikeramatkan, seperti "Pancuran Telu" yang kerap dikunjungi warga sekitar Banyumas untuk melakukan ritual-ritual *kejawen*. Selain itu, juga untuk meresistensi perkembangan ajaran Kristen. Hal tersebut karena lokasinya hanya berjarak tidak lebih dari tiga kilometer dari Sekolah Tinggi Teologi Soetira Purwokerto, yang sudah berdiri sejak 2002.

Pada Pemilu 2019, kuatnya fragmentasi kekuatan Islam dalam masing-masing kubu semakin mempertegas peran Salafisme dalam pergulatan identitas di Banyumas. Hal ini karena pemakaian isu agama dalam penyelenggaraan politik elektoral di Banyumas merupakan aspek

penting dalam upaya mobilisasi masa. Pada Pemilihan Bupati (Pilbup) Banyumas 2013, strategi memasang Budi Setiawan, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (Ketua DPC) PDI-P Banyumas dengan latar belakang Katolik dengan Achmad Husein tidak lain dikarenakan isu agama masih penting di Banyumas. Pada Pilbup 2018, beberapa hari sebelum pencoblosan, puluhan masa yang terdiri dari Barisan Anshor Serbaguna (Banser), FPI dan Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda (Kokam) Muhammadiyah menggeruduk kantor PDI-P Banyumas. Aksi ini dipicu tindakan kader PDI-P yang tidak senang dengan kegiatan *bisyaroh* (salam tempel). Puluhan masa menilai bahwa apa yang telah dilakukan PDI-P mencederai budaya masyarakat Islam di Banyumas. Oleh karena itu, usaha menempatkan Salafisme sebagai strategi untuk “memutihkan” Banyumas yang selama ini dikenal dengan basis masa *abangan* (“kandang banteng”) menjadi sangat logis.

Secara garis besar, Salafisme di Banyumas terkumpul di tim pemenangan Koppasandi (Komando Ulama untuk Pemenangan Prabowo-Sandi), yang diketuai oleh Ketua FPI Banyumas, Kyai Slamet. Koppasandi merupakan tim pemenangan khusus Prabowo-Sandi, yang hanya ada di Jateng dan Jatim (Jawa Timur), yang menggunakan ulama, ustaz, da'i, santri sebagai alat mobilisasi masa. Tim ini dibuat atas dasar rekomendasi Ijtima Ulama II dan mandat Imam Besar FPI, Habib Rizieq Shihab. Lebih detail lagi secara hirarki adalah sebagai berikut; 1) Dewan Pembina, Habib Rizieq Syihad; 2) Dewan Penasihat Ahmad Choliz Ridwan, Wakil Ketua Dewan Pembina Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) dan Pembina Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia (BKSPPI); 3) Dewan Pengarah yang diketuai oleh Yusuf Martak, Ketua Umum Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-U). dan Dewan Pakar yang diketuai oleh Heppt Trenggono, Presiden Indonesia Islamic Business Forum (IIBF). Seperti yang diketahui bahwa DDII merupakan salah satu lembaga yang paling signifikan berperan dalam perkembangan Salafisme di Indonesia, termasuk di Banyumas.

DDII merupakan organisasi dakwah yang menjadi agen utama dana bantuan dari Timur Tengah, khususnya Saudi Arabia, untuk pembangunan sarana prasarana penunjang penyebaran Salafisme, seperti masjid, sekolah, yayasan dan pesantren yang digunakan sebagai tempat pelatihan da'i. Salah satu capaian dari program tersebut adalah berdirinya Lembaga Ilmu Pengetahuan dan Bahasa Arab (LIPIA). Lembaga ini menjadi fasilitator pelatihan da'i, yang nantinya dikirim untuk belajar di universitas-universitas Islam di Timur-Tengah melalui program beasiswa yang mereka canangkan. Setelah selesai menempuh pendidikan di Timur-Tengah, dan kembali ke Indonesia, para lulusannya menyebar ke seluruh Indonesia dan menjadi tenaga pengajar di yayasan, pesantren serupa, membuka *halaqah* dan *daurah* di kotanya masing-masing. Beberapa di antaranya bahkan mendirikan pesantren Salafi yang identik dengan corak pendirinya. Pada tahun 1980 hingga 1990, mulai banyak berdiri yayasan dan pesantren Salafi.

Dalam upaya memobilisasi masa, Kyai Slamet juga tidak luput dari banyaknya aksi-aksi penolakan dari warga Banyumas. Hal ini karena elemen masyarakat Banyumas secara historis pernah menolak keberadaan FPI, melalui aksi-aksi turun ke jalan yang dilakukan setelah kasus pemenjaraan Basuki Tjahaja Purnama di DKI Jakarta. Elemen masyarakat Banyumas terkonsolidasi dalam aliansi Benteng Nusantara, yang didalamnya terdapat elemen ormas nasionalis dan keagamaan, seperti Pemuda Pancasila, SAPMA Pemuda Pancasila, Gebrak RI, KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia), PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) dan berbagai elemen ormas berskala kecil lainnya. Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan Pemilu 2019, Kyai Slamet sempat dihakimi oleh beberapa warga Banyumas. Bahkan penghakiman tersebut melibatkan elemen kenegaraan.

Kuatnya Salafisme di Banyumas juga berpengaruh terhadap narasi yang diproduksi dalam konten kampanye, seperti misalnya menggunakan ungkapan “*Bu, Pak aja pilih sing ora Jumatan ya,*” maksud dari ungkapan ini adalah

supaya memilih pemimpin yang dekat dengan Islam dan nilai-nilai keislaman yang selama ini dekat dengan kubu Prabowo-Sandi karena legitimasi yang diberikan oleh Ijtimak Ulama II. Ungkapan ini dilontarkan warga ketika ada tim pemenangan dari elemen Kristen melakukan kampanye Jokowi-Ma'ruf di Kecamatan Baturraden, Kembaran, Sokaraja dan Sumbang. Bahkan ungkapan-ungkapan semacam itu hampir terjadi di seluruh dapil di Banyumas bahkan Cilacap.

Berdasarkan kasus-kasus tersebut maka apa yang terjadi di Banyumas menunjukkan bahwa politik identitas dikonstruksikan untuk bermain pada politik elektoral. Identitas dalam pengalaman elektoral di Banyumas menjadi komoditas dalam politik elektoral yang berlangsung. Dengan demikian, realita keragaman agama di Banyumas bukan saja menjadi sebuah khazanah yang unik dan harus disyukuri, melainkan juga berpotensi menimbulkan konflik dan perpecahan. Selain karena kuatnya konstruksi politik identitas dalam politik elektoral di Banyumas sebagai sumber konflik, politik elektoral yang mengarah kepada perkembangan politik plutokrasi juga menjadi sumber konflik lainnya. Kegiatan politik elektoral yang berbiaya mahal berakibat pada ketergantungan parpol maupun kandidat terhadap sumberdaya materil. Pada titik ini pebisnis dan aktor politik bertemu.

Keterlibatan kelompok minoritas bisnis Arab dalam politik praktis lokal secara langsung maupun tidak langsung memperkuat dominasi ekonomi mereka di tingkat lokal. Sehingga konsentrasi kekayaan hanya berputar di sekitaran lingkaran mereka. Hal ini melahirkan gap ekonomi di Banyumas yang berakibat pada pemerataan ekonomi dan kemiskinan. Menurut Amy Chua, penguasaan materi oleh kelompok minoritas (*market dominant minorities*) melahirkan kecemburuan mayoritas. Hal tersebut menjadi akar konflik. Meskipun jumlah PAD Banyumas tinggi, namun belum diikuti dengan pemerataan ekonomi bagi warganya. Dengan demikian, berakibat pada tingginya kesenjangan sosial dan kemiskinan di Banyumas. Besaran pendapatan tersebut belum diserap secara optimal untuk

pengadaan lapangan kerja. Hal tersebut berdampak pada terbatasnya lapangan kerja yang menjadikan tidak semua pencari kerja segera mendapatkan kerja. Jumlah pencari kerja yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM (Dinnakerkopukm) Banyumas sebesar 9.483 orang. Namun, angka tersebut dirasa dibandingkan dengan penduduk yang tidak melakukan pendaftaran di Dinnakerkopukm. Para pencari kerja tersebut didominasi lulusan Sekolah Menengah Atas dan sederajat (SMA/K). Banyaknya pengangguran menciptakan kesenjangan sosial ekonomi yang berujung pada kemiskinan. Jumlah penduduk miskin di Banyumas mencapai 17.05 persen atau 283.200 penduduk. Persentase penduduk miskin Banyumas jauh lebih tinggi dari rata-rata penduduk miskin Jawa Tengah, 13.01 persen bahkan angkanya lebih besar dari Kabupaten Cilacap, yakni 13.94 persen. Hal tersebut menandakan bahwa pertumbuhan ekonomi di Banyumas tidak dibarengi dengan pemerataan ekonomi. Dalam hal ini berarti sektor-sektor pertumbuhan ekonomi hanya didominasi oleh segelintir orang.

Pertumbuhan ekonomi Banyumas dari tahun 2010 hingga 2016 mencapai 6.21 persen. Persentase ini menempati urutan kedua pertumbuhan ekonomi tertinggi di Jawa Tengah. Tren positif pertumbuhan ekonomi di Banyumas berdampak kepada naiknya pendapatan per kapita penduduk setiap bulannya mencapai 1.994.692 rupiah. Namun, paradoksal karena tidak diikuti dengan pemerataan ekonomi. Pendapatan per kapita tersebut terbilang kecil jika dibandingkan dengan pendapatan kelompok bisnis keluarga Basalamah yang menguasai investasi di sektor perumahan, kawasan perindustrian dan perkantoran atau sub sektor real estate. Sektor ini secara global menyumbang 39 persen nilai realisasi investasi atau setara dengan 121.147.572.000 rupiah nilai investasi di Banyumas.

SIMPULAN

Sistem kemasyarakatan Banyumas selama ini identik dengan nilai hidup *brayan urip* (hidup rukun). Hal ini menunjukkan bahwa hubungan

kemasyarakatan di Banyumas bersifat terbuka dan harmonis. Namun demikian, keharmonisan hidup masyarakat Banyumas bukan berarti tanpa tantangan. Dalam hal ini, terdapat dua aspek paling dominan yang memberikan dinamika konsep nilai hidup *brayan urip*, yaitu perkembangan Salafisme dan dominasi ekonomi oleh kelompok minoritas. Salafisme memiliki corak keislaman yang bertolak belakang dengan struktur sosio-kultural Banyumas. Selama ini, Banyumas dikenal dengan corak keislaman yang identik dengan Islam *kejawan*. Corak keislaman ini tidak kaku sehingga dianggap lebih toleran terhadap keberadaan agama lain, seperti Kristen. Agama Kristen menjadi agama dengan jumlah pemeluk terbesar di Banyumas. Salafisme adalah Islam murni. Tujuannya adalah untuk memurnikan ajaran Islam dari *bid'ah*, *syirik* dan *khurafat* yang mana hal tersebut identik dengan Islam *kejawan* dan Kristen. Oleh karena itu, keberadaan Salafisme tidak lain adalah untuk melakukan resistensi terhadap perkembangan Islam *kejawan* dan Kristen. Resistensi dari kalangan Salafi juga mendapatkan resistensi dari penganut Islam *kejawan* di Banyumas yang acapkali berujung pada konflik, seperti penolakan jemaat Gereja Katedral dan JAI terhadap pembangunan Masjid Besar Jenderal Soedirman, penolakan warga Purwokerto Selatan terhadap pembangunan Masjid Al-Furqon dan penolakan warga Nahdhiyin terhadap pembangunan *boarding shcoll* Al-Irsyad di Baturraden.

Pada Pemilu 2019, Banyumas menjadi wilayah kunci kemenangan pasangan Jokowi-Ma'ruf di Jawa Tengah. Namun pada penyelenggaraan pemilu kali ini mendapatkan tantangan cukup kuat dari penantangannya, Prabowo-Sandi yang menggunakan Salafisme sebagai upaya “memutihkan” Banyumas yang selama ini dikenal sebagai wilayah *abangan*. Usaha “memutihkan” Banyumas menggunakan tim pemenangan Koppasandi, yang menggunakan alat keagamaan sebagai alat mobilisasi masa.

Penggunaan isu agama dalam dinamika politik elektoral Banyumas dianggap penting hingga sekarang. Oleh karena itu, penempatan

Koppasandi sebagai tim pemenangan yang menggunakan Salafisme sebagai alat mobilisasi masa merupakan hal yang tepat. Penggunaan isu agama dalam politik elektoral di Banyumas juga menghiasi konflik keagamaan di Banyumas, seperti penolakan terhadap FPI, persekusi terhadap Ketua Umum Koppasandi Banyumas, Kyai Slamet, produksi konten kampanye berbasis keagamaan, seperti “*Bu, Pak aja pilih sing ora Jumatan ya,*” maksud dari ungkapan ini adalah supaya memilih pemimpin yang dekat dengan Islam dan nilai-nilai keislaman yang selama ini dekat dengan kubu Prabowo-Sandi karena legitimasi yang diberikan oleh Ijtima Ulama II. Selain itu, perkembangan politik elektoral Banyumas yang mengarah kepada perkembangan politik plutokrasi. Kegiatan politik elektoral yang berbiaya mahal berakibat pada ketergantungan parpol maupun kandidat terhadap sumberdaya materil.

Keniscayaan politik elektoral di tingkat daerah yang membutuhkan uang sangat banyak untuk kontestasi, menciptakan keterlibatan pebisnis dalam politik praktis lokal secara langsung maupun tidak langsung. Dalam penyelenggaraan politik elektoral di Banyumas, salah satu pebisnis besar adalah dari kelompok minoritas bisnis Arab. Adapun kelompok bisnis Arab yang paling dominan berasal dari keluarga Basalamah. Keluarga Basalamah menguasai bisnis di bidang konstruksi, properti, furnitur, kesehatan hingga pendidikan. Beberapa aktornya adalah Natsir Basalamah, Syafiq Basalamah, Ali Umar Basalamah dan Ali Rofi Basalamah. Mereka berafiliasi dengan kelompok Salafisme terbesar di Banyumas, yaitu Al-Irsyad Purwokerto dan Jaringan Pondok Pesantren Al-Manshuroh Mujur. Selain menjadi pebisnis, terdapat anggota kelompoknya yang sekaligus menjadi aktor politik. Semuanya berafiliasi dengan PKS. Keterlibatan kelompok minoritas bisnis Arab dalam politik praktis lokal secara langsung maupun tidak langsung memperkuat dominasi ekonomi mereka di tingkat lokal. Sehingga konsentrasi kekayaan hanya berputar di sekitaran lingkaran mereka. Hal ini melahirkan gap ekonomi di Banyumas yang berakibat pada pemerataan ekonomi dan

kemiskinan. Penguasaan materi oleh kelompok minoritas (*market dominant minorities*) melahirkan kecemburuan mayoritas. Hal tersebut menjadi akar konflik.

DAFTAR PUSTAKA

- Berg, L. V. (1989). *Le Handramaout Et. Les Colonies Arabes*. Jakarta: INIS.
- Dermawan, W. (2013). Globalisasi dan Konflik Etnis Pasca Reformasi di Indonesia: Suatu Isu dan Kerangka Konseptual. *Credible*, 80.
- Feith, H. (1999). *Pemilihan Umum 1995 di Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Geertz, C. (1989). *Penjaja dan Raja*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Hadiz, R. R. (2014). Ekonomi Politik Oligarki dan Pengorganisasian Kembali Kekuasaan di Indonesia. *Prisma*, 37.
- Katherine A. Piatti. (2004). *Market Dominant Minorities and Ethnic Relations: Does the free market facilitate dominant minority groups and exacerbate ethnic hatred and violence?* New York: State University of New York.
- Kesheh, N. M. (2007). *Hadrami Awakening Kebangkitan Hadrami di Indonesia*. Jakarta: Akbar Media Eka Sarana.
- Koetjaraningrat. (1984). *Kebudayaan Jawa*. Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Marwah, S. (2014). *Kontestasi Perempuan dan Politik Dalam Budaya Banyumas*. Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman.
- Priyadi, S. (2015). Babad Pasir, Islamisasi, dan Pendidikan Pasir dalam Tajdid. *Jurnal Ilmu-ilmu Agama Islam dan Kebudayaan*, 10-16.
- statistika, B. P. (2016). *Kabupaten Banyumas Dalam Angka*. Cilacap: BPS Kabupaten Cilacap.